

2023

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Perumahan
Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Sumatera V



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami beserta pejabat dan staf di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat melaksanakan tugas-tugas hingga akhir tahun 2023.

Dengan ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini menyajikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V pada tahun 2023 sebagai dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan, serta berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2020-2024.

Laporan ini juga berisi tentang pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terhadap tugas yang diemban berdasarkan tugas dan fungsi yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penyajian laporan ini telah diupayakan dengan semaksimal mungkin. Namun, kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Untuk itu, kami berlapang hati untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan terhadap Laporan Kinerja di masa mendatang.

Palembang, 4 Januari 2024

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Sumatera V



Ir. Johnny Rakhman, Dipl.E.Eng
NIP. 19670208 199803 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja Balai secara akuntabel yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai wujud keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam ber-organisasi yang sistematis dan melembaga.

Adapun dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka secara berjenjang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menetapkan tujuan yaitu:

"Mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Sumatera V"

Tujuan ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan sasaran-sasaran strategis bidang perumahan, diantaranya:

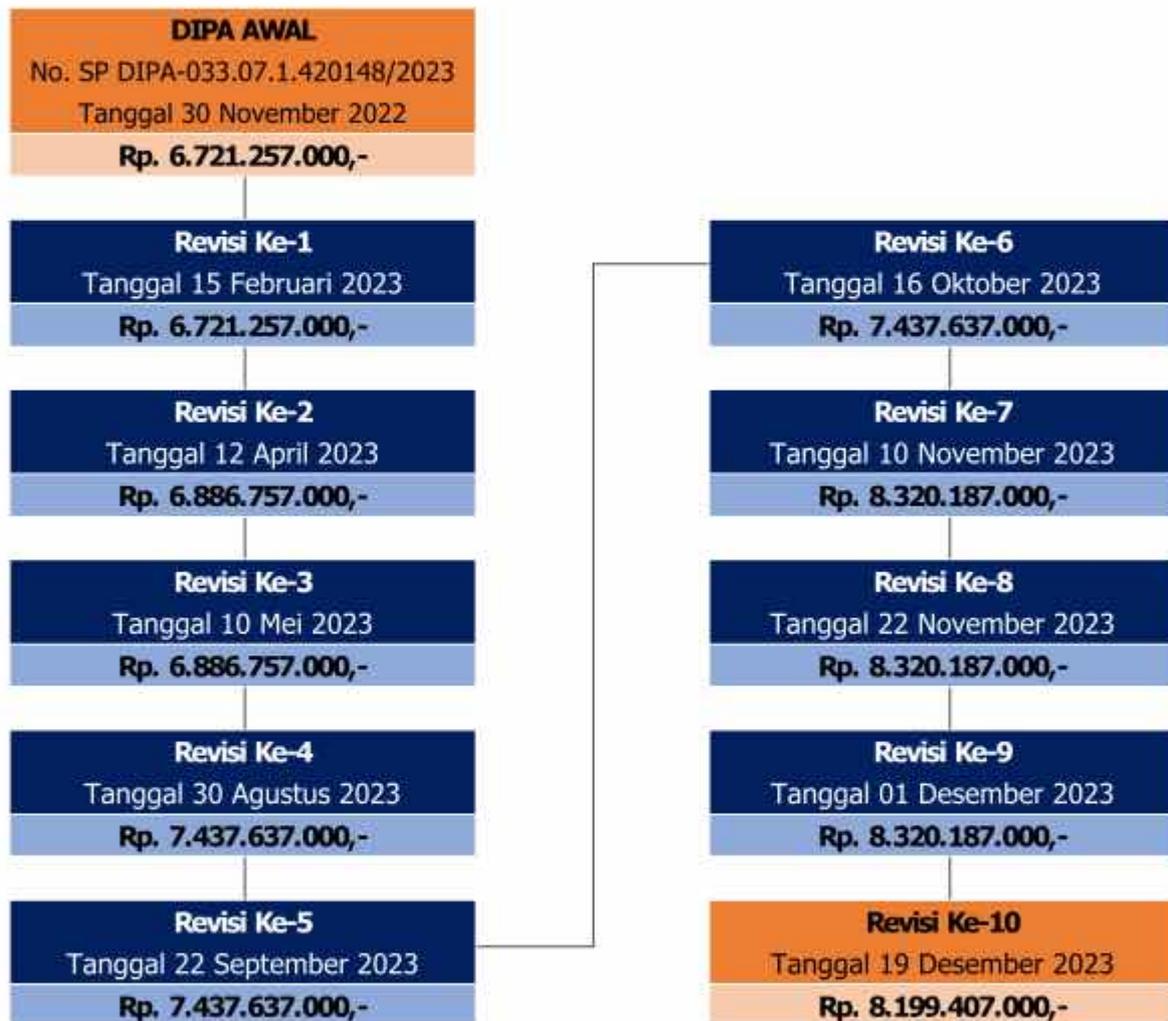
1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan bantuan PSU perumahan; dan
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Dalam mewujudkan kedua sasaran tersebut, dibuatlah indikator kinerja yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Tahun 2023, indikator kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan
		2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.048 Unit
		3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	119 Unit
		4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower
		5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit
		6	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	16 Unit
		7	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	1.950 Unit
		8	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		TARGET
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan
		3	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan

Sepanjang tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah melakukan revisi DIPA sebanyak 10 kali yang dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Berdasarkan DIPA Revisi Ke-10 tanggal 19 Desember 2023, anggaran total Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah sebesar Rp. 8.199.407.000,-. Hingga akhir bulan Desember 2023, anggaran yang berhasil diserap adalah sebesar Rp. 7.925.787.000,- atau sekitar 96,66% dari target.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tugas dan Fungsi	7
1.3 Struktur Organisasi	8
1.4 Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Renstra	14
2.2 Perjanjian Kinerja	17
2.3 Metode Pengukuran	19
2.4 Target Tahun ini Menurut Renstra	19
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
3.1 Sumber Daya Manusia	23
3.2 Sarana dan Prasarana	29
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	30
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
4.1 Capaian Kinerja	38
4.2 Perbandingan Kinerja	45
4.3 Realisasi Anggaran	52
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Rekomendasi	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan perumahan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Selain daripada itu, faktor urbanisasi yang semakin marak terlaksana menyebabkan adanya tuntutan akan kebutuhan perumahan di perkotaan semakin besar, sementara minimnya lahan yang tersedia dan lonjakan harga dari tanah yang semakin tinggi menyebabkan pekerjaan akan penyediaan perumahan menjadi sulit untuk terlaksana secara baik.

Di tahun 2023, Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk kembali mendorong perekonomian nasional. Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan, tidak hanya mengemban tugas untuk melaksanakan penyediaan perumahan guna menuntaskan kebutuhan perumahan dan mengurangi angka backlog saja, namun juga dalam rangka untuk mendukung Program Nasional, di antaranya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Sebagaimana yang diaturkan dalam perundang-undangan, instansi pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja dan anggaran yang telah diberikan. Oleh karena itu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, dalam hal ini menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 guna memberikan laporan yang transparan dan akuntabel terhadap anggaran dan kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Oleh karena itu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dalam hal ini menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 guna memberikan laporan yang transparan dan akuntabel terhadap anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V juga menaungi 3 (tiga) satuan kerja di bawahnya yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perumahan dan dipimpin oleh Kepala Balai.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Dalam melakukan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- f. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- g. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
- h. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

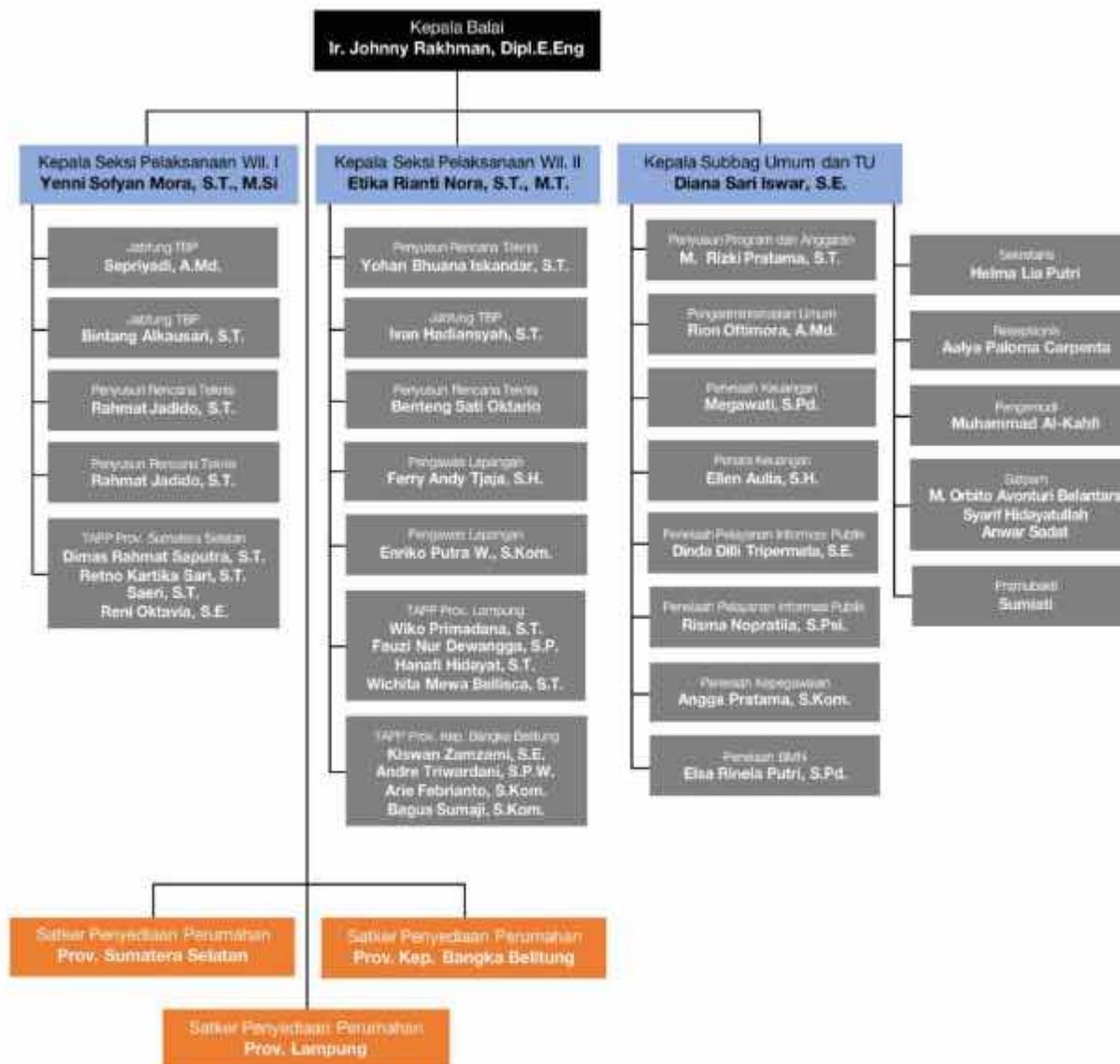
1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menurut Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Struktur dan Organisasi Balai P2P Sumatera V

Adapun struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dijabarkan melalui bagan di bawah ini.



Bagan 1.2 Struktur Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2023

Berdasarkan pasal 160 dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2021 tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

1.3.1 Kepala Balai

Adapun tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Balai memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan serta rencana teknis pembangunan;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- d. Melaksanakan fasilitasi serah terima aset;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai;
- f. Mengelola data dan informasi pelaksanaan pembangunan;
- g. Melakukan koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
- h. Melakukan koordinasi penyediaan dan pengembangan lahan; dan
- i. Melaksanakan fungsi dan tugas lain oleh Direktorat Jenderal Perumahan.

1.3.2 Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha. Adapun yang menjadi lingkup pekerjaan Subbagian Umum dan Tata Usaha antara lain:

- a. Melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- b. Melaksanakan verifikasi produk hukum pelaksanaan program kegiatan;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran;
- e. Mengelola pembukuan bendahara dan keuangan;
- f. Menyusun Dokumen Penggunaan Anggaran;
- g. Menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa;
- h. Melaksanakan penatausahaan keuangan administrasi pengajuan permintaan dan verifikasi administrasi keuangan serta Laporan Keuangan;
- i. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang, pemeliharaan aset, daftar inventarisasi aset dan laporan pengadaan barang;
- j. Melaksanakan pemeliharaan Gedung Kantor, Peralatan, dan urusan kerumahtanggaan;

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai; dan
- l. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai sesuai standar yang ditetapkan.

1.3.3 Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah

Seksi Pelaksanaan Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Wilayah. yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan penelaahan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan perumahan;
- c. Melaksanakan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perumahan;
- e. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan penyediaan perumahan;
- g. Melaksanakan penyiapan data sebagai bahan fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perumahan dan permukiman, serta menyajikan alternatif pemecahan;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas bawahan;
- k. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki 2 (dua) Kepala Seksi (Kasi) Wilayah, dimana Kasi Wilayah I menaungi seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dan Kasi Wilayah II menaungi seluruh wilayah di Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Wilayah ini melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang bekerja di wilayah kerjanya. Selain daripada itu, dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, dibentuklah kelompok jabatan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Satuan Kerja.

- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1044/KPTS/M/2023 tanggal 16 Agustus 2023

1.4 Isu Strategis

Penyelenggaraan penyediaan perumahan merupakan suatu rangkaian kegiatan kompleks yang dalam pelaksanaannya akan banyak menemui hambatan dan tantangan. Di tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terus memaksimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan untuk dapat meraih hasil yang mendekati optimal. Adapun beberapa isu-isu strategis yang dihadapi Balai di tahun ini diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai yang menyebabkan beberapa orang harus mengerjakan pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsinya;
2. Minimnya peran Balai sebagai mediator diantara *stakeholders* untuk melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan banyak berperan dalam verifikasi, pengawasan dan pengendalian penyediaan perumahan;
3. Belum tersedianya basis data perumahan komprehensif yang mampu dijadikan acuan atau pedoman dalam menentukan strategi penyediaan perumahan yang tepat dan
4. Belum tersedianya anggaran/dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih bahkan ketidakcocokan dalam pendanaan dalam pengadaan perumahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

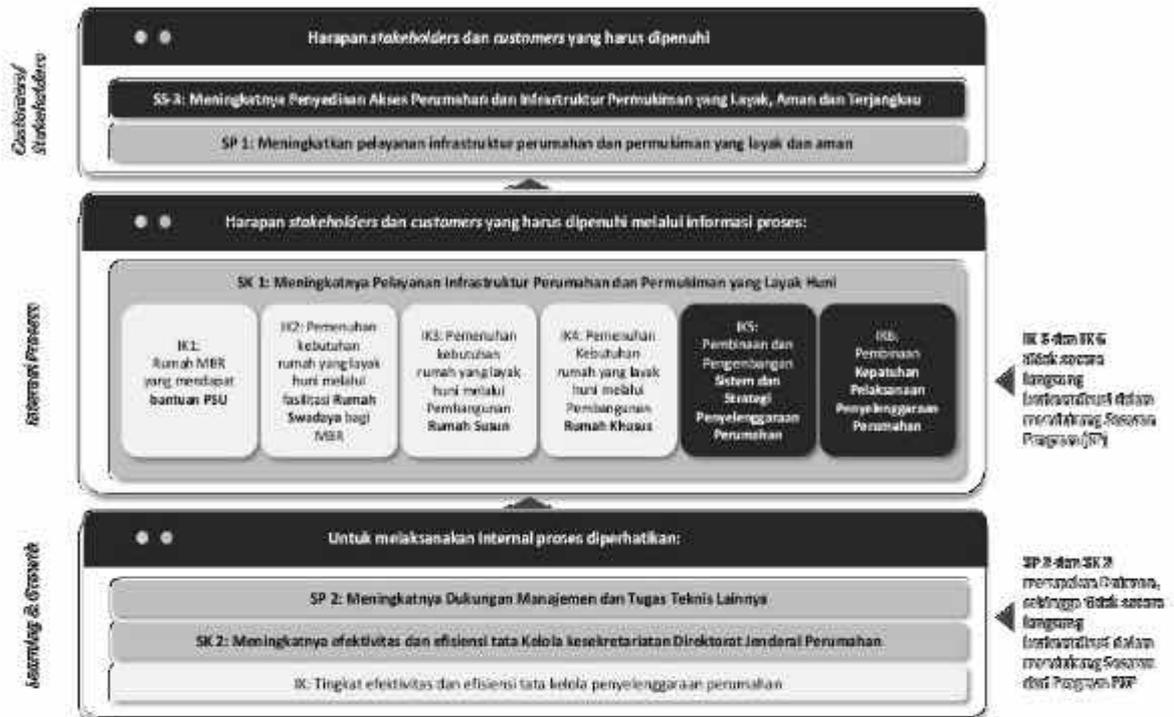
Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2020–2024 melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah layak huni yang dimaksud dalam konteks ini adalah bangunan rumah yang memenuhi 4 (empat) indikator dasar sesuai dengan parameter *Sustainable Development Goals (SDGs)*, antara lain:

1. Kecukupan luas bangunan, yang menggunakan ketentuan minimal 7,2 m² per kapita penghuni;
2. Ketahanan konstruksi, untuk memastikan pemenuhan aspek kelayakan struktur/keselamatan bangunan dan kesehatan;
3. Akses air minum layak yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian penghuni;
4. Akses sanitasi layak.

Selain itu, pembangunan perumahan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan turut pula berperan dalam pencapaian misi kedua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu menyelenggarakan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan oleh Direktorat Jenderal Perumahan juga sekaligus menjadi upaya dalam mewujudkan Sasaran Strategis Ke-3 (SS-3) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau dengan indikator kinerjanya adalah persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perumahan merencanakan 2 (dua) sasaran program yaitu: (1) Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Perumahan Permukiman yang Layak dan Aman, dan (2) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknik Lainnya.

Adapun dalam mencapai sasaran ini, Direktorat Jenderal Perumahan merumuskan peta strategis sebagai berikut:



Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di Kementerian PUPR, Renstra dibuat terlebih dahulu di tingkat Direktorat Jenderal baru kemudian Unit Organisasi, Unit Kerja, atau UPT membuat Renstra masing-masing.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2020-2024, tujuan penyelenggaraan perumahan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah:

“Mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Sumatera V”.

Dalam mendukung arahan Direktorat Jenderal Perumahan tersebut dan dalam rangka mewujudkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menetapkan beberapa sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan ketercapaian.

Adapun yang menjadi target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V di tahun 2020-2024 adalah:

1. Menyediakan 79.070 unit kebutuhan rumah melalui:
 - Pembangunan 3.340 unit Rumah Susun;
 - Pembangunan 453 unit Rumah Khusus; dan
 - Pembangunan 75.217 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik MBR.
2. Menyediakan PSU yang melayani 17.134 unit rumah milik MBR.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V merumuskan 2 (dua) sasaran kinerja yaitu: (1) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni; dan (2) Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Dalam mewujudkan kedua sasaran tersebut, dibuatlah indikator kinerja yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		AWAL	AKHIR
1 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan	6 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	8.505 Unit	10.048 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	131 Unit	119 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	3 Tower	2 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	16 Unit
	7 Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	800 Unit	1.950 Unit
	8 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	-	2 Laporan
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah mengalami beberapa perubahan sepanjang tahun 2023, sebagai berikut:

2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Johnny Rakhman**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan**
Selain itu stasion langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama



Johnny Rakhman
NIP. 19670208 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SARANAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan Kuantitas Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penanganan Perumahan Penyediaan Perumahan 2. Jumlah Menanti Perintah Penanganan Kualitas Rumah Ready 3. Jumlah Rumah Sertan yang dibangun 4. Jumlah Rumah Sertan yang dilampirkan 5. Jumlah Rumah Khawas yang dibangun 6. Jumlah Rumah Khawas yang diperbaiki 7. Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PHU	6 Laporan 8.800 Unit 131 Unit 3 Tahun - Unit - Unit 800 Unit
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Simpan dan Pinjaman Internal 2. Jumlah Layanan Evaluasi Manajemen Saklar 3. Jumlah Layanan Perakmatan	1 Layanan 4 Layanan 4 Layanan

Anggaran

1. Penyediaan Akas Perumahan yang Layak dan Aman	Rp 252.110.846.000
a. Balai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp 4.035.390.000
b. Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp 167.464.388.000
c. Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp 64.322.890.000
d. Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 18.264.252.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp 3.080.800.000
a. Balai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp 2.585.973.000
b. Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp 1.572.700.000
c. Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp 722.481.000
d. Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 166.646.000
Pusat Direktori Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp 6.721.257.000
Pusat Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp 168.571.088.000
Pusat Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp 65.048.361.000
Pusat Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 10.825.140.000
Total	Rp 497.160.846.000

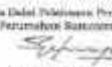
Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal Perumahan



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V



Johnny Rakhman
NIP. 19670208 199803 1 002

2.2.2 Perjanjian Kinerja Akhir

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Johnny Rakhman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilannya akan dipaparkan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Desember 2023

Pihak Kedua



Iwan Suprijanto
NIP. 19710530 199803 1 001

Pihak Pertama



Johnny Rakhman
NIP. 19670228 199803 1 002

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V (DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)																																																								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET																																																						
1. Menegakkan keterlaksanaan Struktur Perumahan	1. Jumlah Laporan Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Pemantauan Perumahan 2. Jumlah Rumah Miskin/Perumahan Perumahan Rumah Miskin 3. Jumlah Rumah Miskin yang dibangun 4. Jumlah Rumah Miskin yang dipelihara 5. Jumlah rumah miskin yang dibangun 6. Jumlah rumah miskin yang dipelihara 7. Jumlah rumah yang diserahkan ke rumah PKH 8. Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan pembangunan rumah dan pemukiman miskin	6. Laporan 80.046.043 118.046 2.046 18.000 3.000.000 2.046																																																						
2. Menegakkan keterlaksanaan dan efektivitas serta tingkat keakuratan dan ketepatan anggaran perumahan	1. Jumlah Laporan Laporan dan Transaksi Internal 2. Jumlah Laporan Evaluasi Manajemen Belanja 3. Jumlah Laporan Pelaksanaan	1. Laporan 4. Laporan 4. Laporan																																																						
<p>Revisi:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Revisi</th> <th style="text-align: right;">Rp</th> <th style="text-align: right;">Anggaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Penyelidikan Akuan Perumahan yang Layak dan Aman</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera V</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">297.000.872.000</td> </tr> <tr> <td>b. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">4.600.000.000</td> </tr> <tr> <td>c. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">1.440.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>d. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">191.919.000.000</td> </tr> <tr> <td>e. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">42.380.000.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pelaksanaan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera V</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">7.124.118.000</td> </tr> <tr> <td>b. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">1.345.204.000</td> </tr> <tr> <td>c. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">200.000.000</td> </tr> <tr> <td>d. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">1.900.000.000</td> </tr> <tr> <td>e. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>Pagar Belanja Dalam Pelaksanaan Penyelidikan/Proyek/Perumahan Sumatera V</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">6.100.000.000</td> </tr> <tr> <td>Pagar Belanja Proyek dan Perumahan/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">100.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>Pagar Belanja Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">101.245.000.000</td> </tr> <tr> <td>Pagar Belanja Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">43.440.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">304.183.888.000</td> </tr> </tbody> </table>			Revisi	Rp	Anggaran	1. Penyelidikan Akuan Perumahan yang Layak dan Aman			a. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera V	Rp	297.000.872.000	b. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	4.600.000.000	c. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	1.440.000.000.000	d. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	191.919.000.000	e. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	42.380.000.000	2. Pelaksanaan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			a. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera V	Rp	7.124.118.000	b. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	1.345.204.000	c. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	200.000.000	d. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	1.900.000.000	e. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	1.000.000.000	Pagar Belanja Dalam Pelaksanaan Penyelidikan/Proyek/Perumahan Sumatera V	Rp	6.100.000.000	Pagar Belanja Proyek dan Perumahan/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	100.000.000.000	Pagar Belanja Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	101.245.000.000	Pagar Belanja Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	43.440.000.000	Total	Rp	304.183.888.000
Revisi	Rp	Anggaran																																																						
1. Penyelidikan Akuan Perumahan yang Layak dan Aman																																																								
a. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera V	Rp	297.000.872.000																																																						
b. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	4.600.000.000																																																						
c. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	1.440.000.000.000																																																						
d. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	191.919.000.000																																																						
e. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	42.380.000.000																																																						
2. Pelaksanaan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan																																																								
a. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera V	Rp	7.124.118.000																																																						
b. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	1.345.204.000																																																						
c. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	200.000.000																																																						
d. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	1.900.000.000																																																						
e. Substansi Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	1.000.000.000																																																						
Pagar Belanja Dalam Pelaksanaan Penyelidikan/Proyek/Perumahan Sumatera V	Rp	6.100.000.000																																																						
Pagar Belanja Proyek dan Perumahan/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	100.000.000.000																																																						
Pagar Belanja Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	101.245.000.000																																																						
Pagar Belanja Penyelidikan/Pencarian/Proyek/Perumahan Sumatera	Rp	43.440.000.000																																																						
Total	Rp	304.183.888.000																																																						

Jakarta, 03 Desember 2023

Direktur Jenderal Perumahan



Iwan Suprijanto
NIP. 19710530 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V



Johnny Rakhman
NIP. 19670228 199803 1 002

2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa pencapaian target diukur melalui perbandingan antara realisasi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berlaku terhadap pekerjaan fisik maupun penunjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan yang berada di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

2.4 Target Tahun ini Menurut Renstra

Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan bidang perumahan yang merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menjalankan kegiatan yang terdiri dari kegiatan fisik penyelenggaraan penyediaan perumahan dan permukiman dan kegiatan penunjang berupa dukungan manajemen di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan dan permukiman.

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menurut RENSTRA Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni		
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	57 Laporan
2.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	15.864 Unit
3.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	75.217 Unit
4.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	453 Unit
5.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	3.340 Unit
6.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	111 Tower

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan		
1.	Layanan Perkantoran	20 Layanan
2.	Layanan Umum	20 Layanan
3.	Layanan Sarana Internal	20 Layanan

Sumber: Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

Tabel diatas merupakan target capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V secara menyeluruh untuk tahun 2020-2024. Di tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah merincikan target kinerja yang akan dicapai sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menurut RENSTRA Tahun 2023

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni		
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	12 Laporan
2.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	4.725 Unit
3.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	17.230 Unit
4.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	120 Unit
5.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	1.044 Unit
6.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	33 Tower
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan		
1.	Layanan Perkantoran	4 Layanan
2.	Layanan Umum	4 Layanan
3.	Layanan Sarana Internal	4 Layanan

Sumber: Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

2.4.1 Wilayah I: Provinsi Sumatera Selatan

Adapun capaian output kegiatan tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Target Kinerja Balai di Provinsi Sumatera Selatan TA 2023

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan
	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	3.150 Unit
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	9.750 Unit
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	40 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	486 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	12 Tower

Sumber : Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

2.4.2 Wilayah II: Provinsi Lampung

Adapun capaian output kegiatan tahun 2023 di Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Target Kinerja Balai di Provinsi Lampung TA 2023

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan
	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	1.050 Unit
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	5.490 Unit
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	40 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	370 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	12 Tower

Sumber : Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

2.4.3 Wilayah II: Provinsi Kep. Bangka Belitung

Adapun capaian output kegiatan tahun 2023 di Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Target Kinerja Balai di Provinsi Kep. Bangka Belitung TA 2023

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan
	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	525 Unit
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1.990 Unit
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	40 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	188 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	9 Tower

Sumber : Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

2.4.4 Dukungan Manajemen

Adapun capaian output kegiatan Dukungan Manajemen tahun 2023 berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Target Kinerja Dukungan Manajemen di Balai P2P Sumatera V TA 2023

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan

Sumber : Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau SDM merupakan motor penggerak pada suatu perusahaan dan berfungsi sebagai aset suatu perusahaan. SDM sendiri dapat dilihat dari dua aspek, yaitu SDM dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas SDM terkait dengan angka, yaitu seberapa banyak SDM yang tersedia untuk berkontribusi mengerahkan daya fikir dan fisiknya untuk suatu organisasi. Sedangkan SDM dilihat dari segi kualitas yaitu terkait mutu dan daya saing secara fisik dan fikir dalam suatu organisasi.

Pada tahun 2023, jumlah total pegawai yang bekerja di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah 148 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pusat, Aparatur Sipil Negara Daerah, Non-Aparatur Sipil Negara, dan Konsultan Individual, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Aparatur Sipil Negara	33 Orang
2	Non Aparatur Sipil Negara	28 Orang
3	Konsultan Individual	72 Orang
4	<i>Outsourcing</i>	15 Orang
TOTAL		148 Orang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V hanya 22,00% dari total keseluruhan dan sisanya sebesar 78,00% didominasi oleh Non Aparatur Sipil Negara, Konsultan Individual dan *Outsourcing* yang bertugas sesuai dengan kontrak masing-masing. Selain bertugas di kantor balai, pegawai ini juga tersebar di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

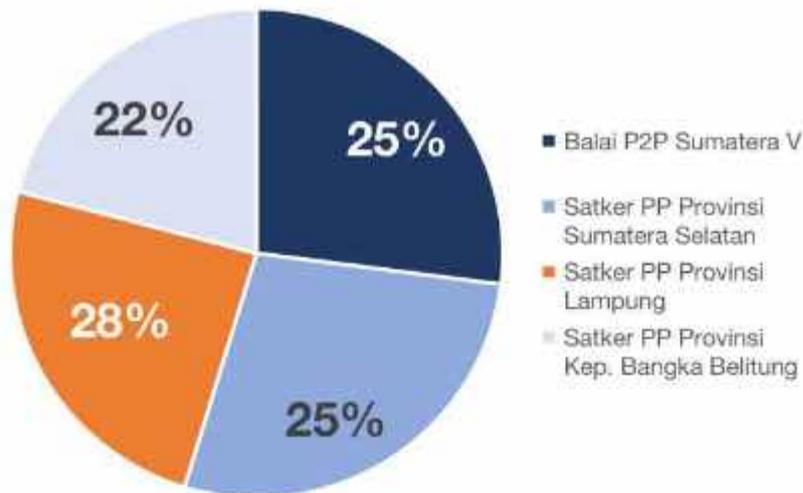
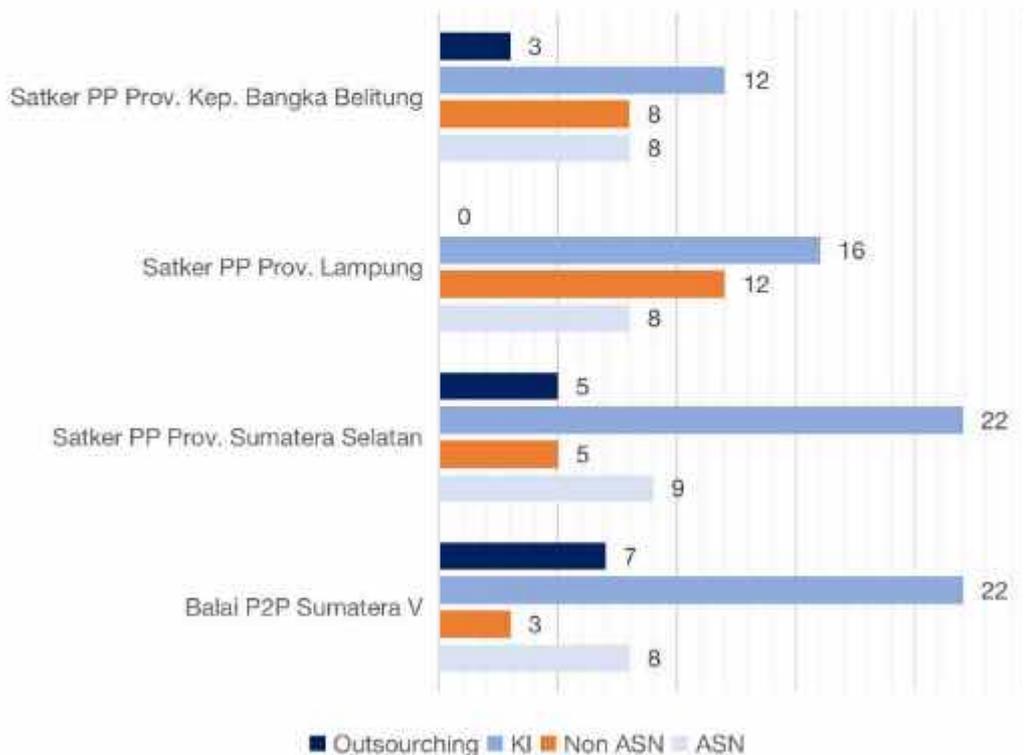


Diagram 3.1 Rasio Sebaran Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023

Adapun komposisi pemetaan pegawai di masing-masing wilayah kerja dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023

3.1.1 Data Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan data sebelumnya, Aparatur Sipil Negara yang bekerja di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V berjumlah 33 orang.

a. Klasifikasi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya, ASN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki rasio yang tidak terlalu signifikan yaitu 16 orang (47,00%) merupakan pegawai wanita dan 17 orang (53,00%) merupakan pegawai laki-laki. Selain itu, dalam pembagian wewenang jabatan pula, tidak ada perbedaan khusus diantara kedua gender ini.

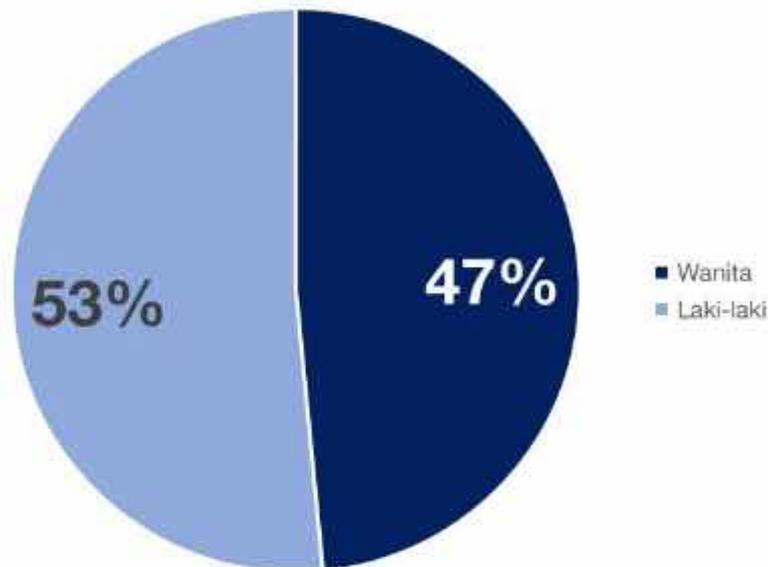


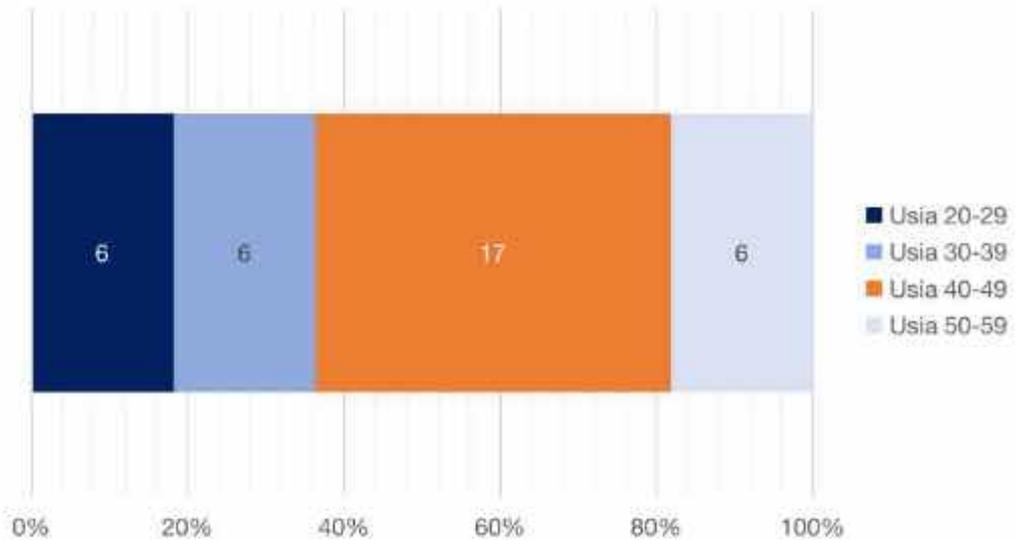
Diagram 3.2 Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Gender

Tabel 3.2 Sebaran ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

JENIS KELAMIN	Balai P2P Sumatera V	Satker PP Prov. Sumsel	Satker PP Prov. Lampung	Satker PP Prov. Kep. Babel
LAKE-LAKE	3 Orang	4 Orang	5 Orang	6 Orang
PEREMPUAN	5 Orang	5 Orang	4 Orang	2 Orang
TOTAL	8 Orang	9 Orang	9 Orang	8 Orang

b. Klasifikasi ASN Berdasarkan Kelompok Usia

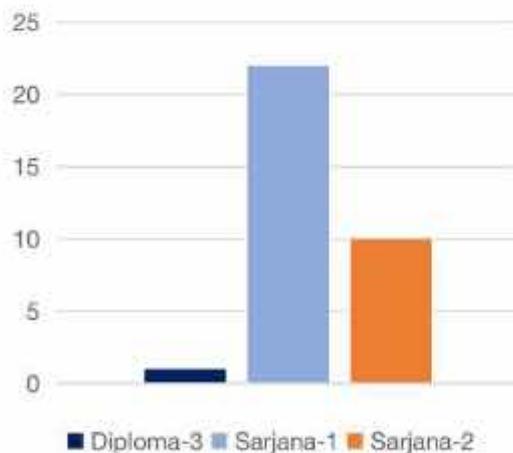
Berdasarkan kelompok usia, ASN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V didominasi oleh kelompok usia ≥ 40 s.d. 49 tahun sebesar 46,00% diikuti oleh kelompok usia ≥ 30 s.d. 39 tahun sebesar 18,00%, kelompok usia ≥ 50 s.d. 59 tahun sebanyak 18,00% dan kelompok usia di bawah 30 hanya 18,00%.



Grafik 3.2 Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Kelompok Usia

c. Klasifikasi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki 33 orang ASN, dimana sebanyak 3,00% merupakan pegawai yang telah menempuh pendidikan hingga D-3 dan sebanyak 67,00% merupakan pegawai yang telah menempuh pendidikan hingga S-1. Sementara pegawai yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang S-2 adalah sebesar 30,00%. Adapun data terkait jenjang pendidikan yang telah ditempuh ASN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dilihat pada grafik dan diagram di bawah ini.



Grafik 3.3 Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

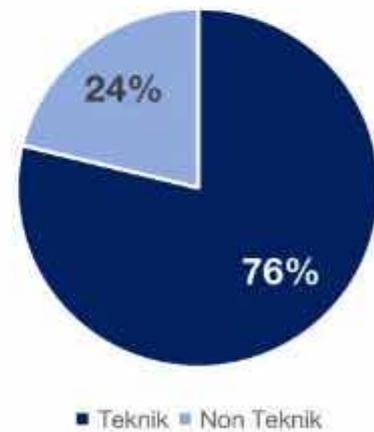


Diagram 3.3 Klasifikasi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Teknis dan Non Teknis

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, ASN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V secara garis besar merupakan pegawai berlatar belakang pendidikan Teknik berjumlah 26 orang yang didominasi oleh lulusan dari jurusan Teknik Sipil. Sedangkan 7 orang lainnya berasal dari latar belakang pendidikan non teknis yang didominasi oleh sarjana ekonomi (S.E.).

d. Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan

Adapun jika dilihat berdasarkan golongan, ASN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terbagi atas 3 (tiga) yaitu Golongan II (II.a s.d. II.d), Golongan III (III.a s.d. III.d), dan Golongan IV (IV.a s.d. IV.d). Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V didominasi oleh ASN Golongan III sebanyak 27 orang dan dilanjutkan dengan Golongan IV berjumlah 6 orang.



Grafik 3.4 Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Golongan

3.1.2 Data Non-Aparatur Sipil Negara (ASN), Konsultan Individual (KI) dan *Outsourcing*

Demi menunjang kinerja Balai dan Satuan Kerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dibantu pula oleh Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Konsultan Individual (KI) dan *Outsourcing*, yang berkontrak secara khusus demi menunjang jalannya suatu kegiatan atau suatu bagian.

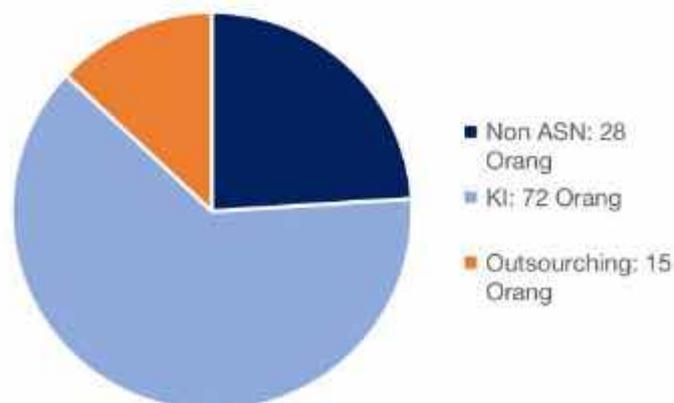


Diagram 3.4 Komposisi Pegawai Non-ASN, KI dan *Outsourcing* Balai P2P Sumatera V

Berdasarkan wilayah kerjanya, jumlah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sebaran Non-ASN, KI dan *Outsourcing* Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

JENIS KELAMIN	Balai P2P Sumatera V			Satker PP Prov. Sumsel			Satker PP Prov. Lampung			Satker PP Prov. Kep. Babel		
	Non ASN	KI	OS	Non ASN	KI	OS	Non ASN	KI	OS	Non ASN	KI	OS
LAKI-LAKI	3	14	4	5	13	4	9	13	-	5	6	3
PEREMPUAN	-	8	3	-	9	1	3	3	-	3	6	-
TOTAL	3	22	7	5	22	5	12	16	-	8	12	3

a. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh, Pegawai Non-ASN dan Konsultan Individual terbagi atas 4 (empat) jenjang pendidikan yaitu: Sarjana S-1, Sarjana S-2, Kelompok Diploma (D-I s.d. D-IV), dan SMA/ sederajat. Sebanyak 24,00% adalah pegawai yang sudah menempuh pendidikan SMA sementara 10,00% telah menempuh pendidikan diploma. Sedangkan pegawai yang telah menempuh pendidikan hingga S-1 mendominasi dengan jumlah mencapai 66,00% dan hanya sekitar 3,00% yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang S-2.

Adapun klasifikasi Pegawai Non-ASN dan Konsultan Individual berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya, dapat dilihat berdasarkan diagram dan grafik di bawah ini.

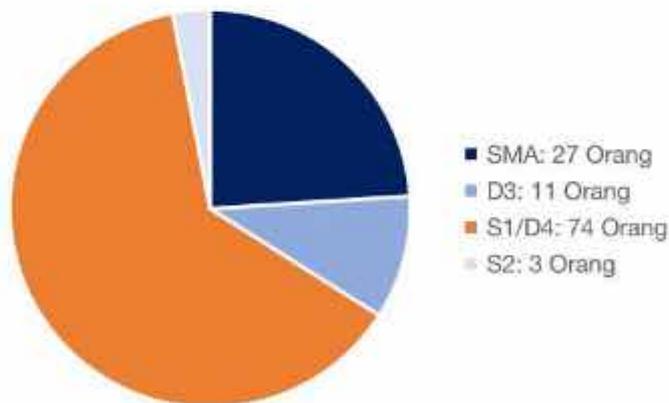
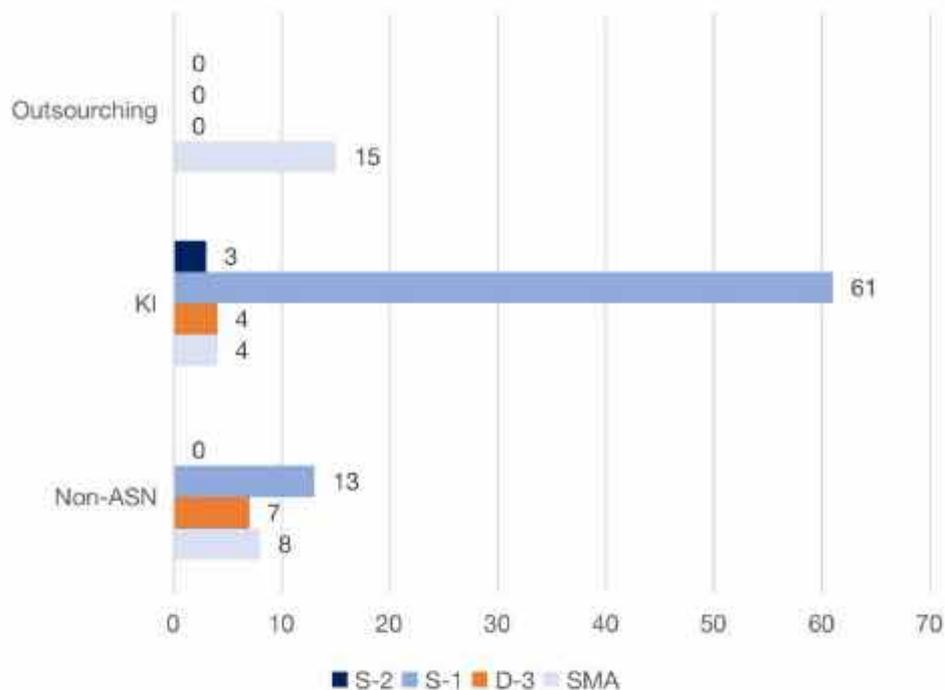


Diagram 3.4 Rasio Perbandingan Pegawai Non-ASN, KI dan *Outsourcing* Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023



Grafik 3.5 Klasifikasi Pegawai Non-ASN dan Konsultan Individual Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

3.2 Sarana dan Prasarana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana pada unit atau satuan kerja yang dianggarkan melalui anggaran negara, atau dalam hal ini melalui pembiayaan APBN, dimasukkan dalam daftar aset Barang Milik Negara (BMN) oleh unit atau satuan kerja masing-masing.

Di tahun 2023, dalam mendukung kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terdapat 146 sarana dan prasarana dengan nilai Rp. 721.775.000,-. Sarana dan prasarana ini terdiri dari peralatan kantor dan alat pengolah data (mesin) seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana BP2P Sumatera V Tahun 2023

KODE	URAIAN	KUANTITAS	SATUAN	NILAI (Rp)
3050104001	Lemari Besi/Metal	3	Buah	9,000,000
3050104002	Lemari Kayu	11	Buah	37,026,000
3050104004	Rak Kayu	1	Buah	2,244,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	1	Buah	3,000,000
3050104007	Brankas	1	Buah	6,000,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	5,610,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	1	Buah	8,976,000

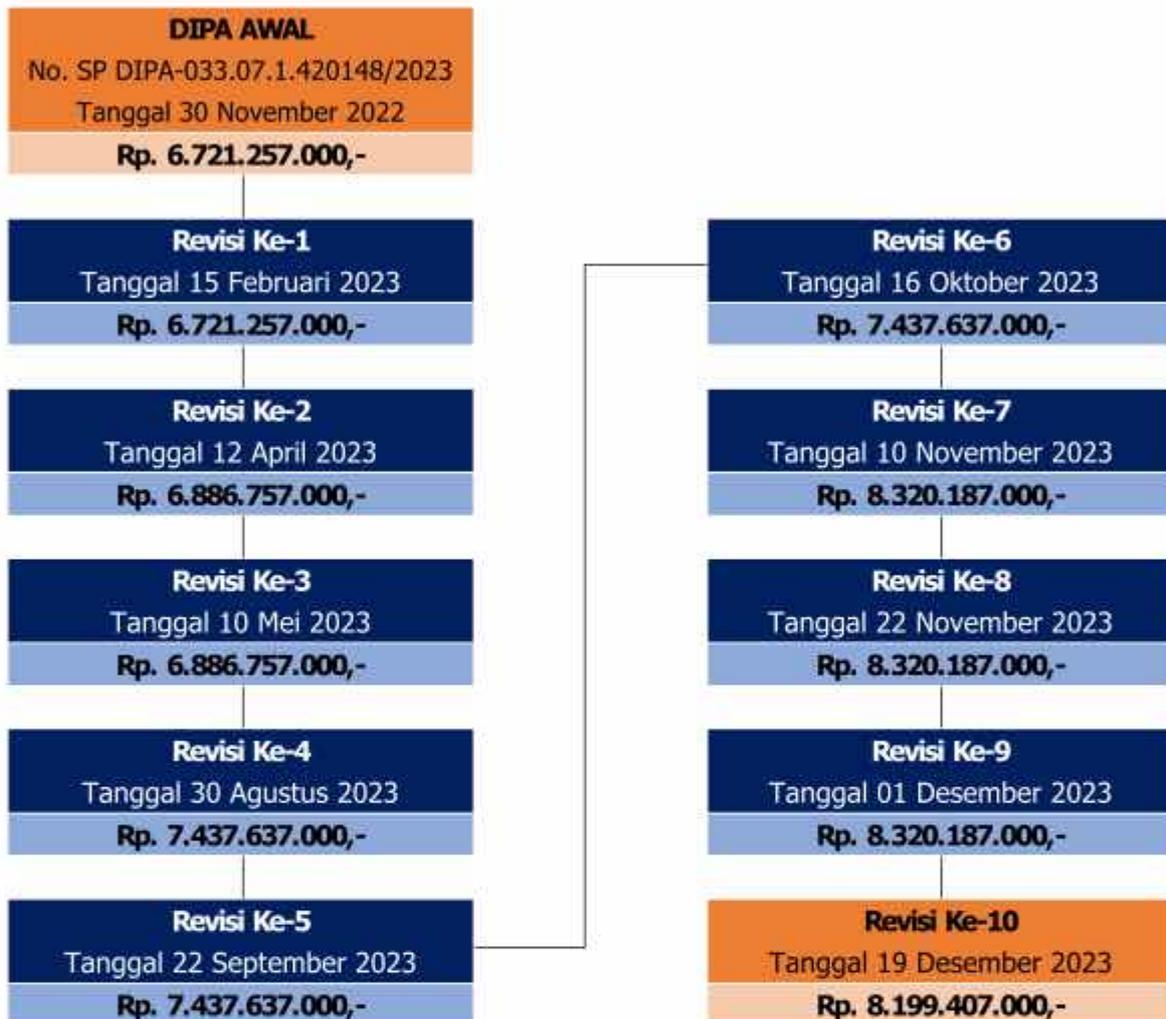
KODE	URAIAN	KUANTITAS	SATUAN	NILAI
3050105058	<i>Focusing Screen/Layar LCD Projector</i>	1	Buah	2,244,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Meta	2	Buah	3,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	30	Buah	27,769,500
3050201003	Kursi Besi/Metal	4	Buah	3,366,000
3050201004	Kursi Kayu	46	Buah	25,806,000
3050201005	<i>Sice</i>	4	Buah	13,232,000
3050201008	Meja Rapat	2	Buah	3,366,000
3050204004	<i>A.C. Split</i>	4	Buah	21,000,000
3050206008	Sound System	1	Buah	7,700,000
3050206020	Camera Video	1	Buah	1,683,000
3050206036	Dispenser	1	Buah	3,366,000
3050206058	Gordyin/Kray	7	Buah	6,058,780
3060102132	<i>Video Conference</i>	1	Buah	9,000,000
3060102167	<i>Drone</i>	1	Buah	23,943,000
3080108044	<i>Lightweight Concrete Test Hammer</i>	1	Buah	16,527,000
3100102001	<i>PC Unit</i>	3	Buah	36,300,000
3100102002	<i>Laptop</i>	10	Buah	201,792,720
3100203003	<i>Printer (Peralatan Personal Komputer)</i>	6	Buah	17,110,000
3100203004	<i>Scanner (Peralatan Personal Komputer)</i>	1	Buah	4,655,000
8010101001	<i>Software Komputer</i>	1	Dummy	222,000,000
TOTAL		146		721,775,000

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Di lingkungan kementerian, DIPA yang digunakan baik oleh pemerintah pusat maupun unit kerja/pelaksana teknis di daerah, dianggarkan melalui anggaran APBN.

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember di tahun anggaran tersebut dianggarkan.

Sepanjang tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah melakukan revisi DIPA sebanyak 10 (sepuluh) kali. Perubahan terhadap DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V selama tahun 2023 dapat dilihat melalui bagan di bawah ini.



Gambar 3.1 Bagan Alur Perubahan DIPA Balai P2P Sumatera V Tahun 2023

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Capaian Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan merupakan unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perumahan di tingkat daerah. Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V di tahun 2023 dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki 2 (dua) sasaran kinerja yaitu meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Adapun dalam penentuan target, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi target kinerja, yaitu berdasarkan perjanjian kinerja/DIPA dan berdasarkan rencana strategis (Renstra). Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.1 Target Kinerja Balai P2P Sumatera V Tahun 2023

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target Tahun 2023	
		RENSTRA	DIPA
Sasaran Strategis: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau			
Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni			
Program/Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni			
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni			
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	12 Laporan	6 Laporan
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	17.230 Unit	10.048 Unit
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	1.044 Unit	119 Unit
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	33 Tower	2 Tower
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	120 Unit	-
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	16 Unit
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	4.725 Unit	1.950 Unit
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	-	2 Laporan

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
Program/Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan			
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan

4.1.1 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni

Salah satu sasaran program Direktorat Jenderal Perumahan adalah Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman. Hal ini didukung oleh sasaran kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V yaitu Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni. Kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan sasaran kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaan perumahan layak huni melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan juga bantuan PSU bagi rumah umum MBR.

Selain dari kegiatan pembangun hunian baru, Direktorat Jenderal Perumahan juga bertanggung jawab pada perawatan dan pemeliharaan hunian yang telah dibangun sebelumnya namun belum diserahkan asetnya kepada penerima manfaat.

Adapun terkait capaian kinerja melalui kegiatan penyediaan akses perumahan layak huni dapat dibandingkan pada 2 (dua) dasar penentuan target, yaitu berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023 dan berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Tahun 2020-2024.

a. Capaian Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Balai P2P Sumatera V Tahun 2023

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau					
Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni					
Program/Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni					
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan	6 Laporan	-	100,00

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Capaian (%)
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.048 Unit	10.045 Unit	3 Unit	99,97
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	119 Unit	119 Unit	-	100,00
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower	2 Tower	-	100,00
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-	-
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	-	100,00
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	1.950 Unit	2.293 Unit	343 Unit	117,59
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan	2 Laporan	-	100,00
TOTAL					102,51

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan sesuai dengan yang tercantum pada DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V tahun 2023, terdapat 8 (delapan) kategori sasaran/output yang diharapkan dapat dicapai oleh balai di tahun ini. Berdasarkan kategori tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mendapatkan rata-rata sekitar 102,51% dan terdapat indikator dengan capaian yang melebihi target yaitu pada jumlah rumah yang mendapatkan bantuan PSU di tahun 2023 ini.

b. Capaian Kegiatan berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai P2P Sumatera V Tahun 2023

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau					
Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni					
Program/Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni					
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	50,00
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	17.230 Unit	10.045 Unit	7.185 Unit	58,30
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	1.044 Unit	119 Unit	925 Unit	11,40
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	33 Tower	2 Tower	31 Tower	6,06
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	120 Unit	-	120 Unit	0,00
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	16 Unit	16 Unit	100,00

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Capaian (%)
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	4.725 Unit	2.293 Unit	2.432 Unit	48,53
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00
TOTAL					18,57

Berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2020-2024, terdapat 8 (delapan) kategori sasaran/output yang harus dicapai oleh balai. Di tahun 2023, target menurut Renstra tersebut hanya mampu mencapai rata-rata 18,57% turun dari capaian pada tahun sebelumnya yang mencapai 36,09%.

4.1.2 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan

Sasaran lain yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Perumahan sesuai dengan visi dan misi Kementerian PUPR adalah Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Hal ini didukung oleh sasaran kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Indikator kegiatan dalam pemenuhan sasaran kegiatan ini diantaranya adalah terwujudnya 3 (tiga) layanan dukungan manajemen satker yaitu Layanan Perkantoran, Layanan Umum, dan Layanan Sarana Internal. Adapun target output capaian kinerja pada kegiatan ini memiliki perbedaan sesuai dengan dasar penentuan target. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel capaian kegiatan di bawah ini.

a. Capaian Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 4.4 Target Kinerja Balai P2P Sumatera V Tahun 2023

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
Program/Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan					
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	-	100,00
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan	-	100,00
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan	-	100,00
TOTAL					100,00

b. Capaian Kegiatan berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024

Tabel 4.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai P2P Sumatera V Tahun 2023

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
Program/Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan					
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 Layanan	1 Layanan	3 Layanan	25,00
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan	-	100,00
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan	-	100,00
TOTAL					75,00

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2020-2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V berkurang dari tahun sebelumnya dikarenakan layanan Sarana dan Prasarana Internal hanya terdapat di Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan realisasi menjadi 75,00% dari target Renstra pada tahun 2023.

4.1.3 Analisis Kinerja Organisasi

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Dalam pencapaian kinerja organisasi, terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan diantaranya:

1. Penyusunan laporan perencanaan penyediaan perumahan yang sesuai tren penyelenggaraan perumahan di wilayah Sumatera V sehingga dapat mencapai target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V;
2. Perencanaan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga setiap kegiatan penyelenggaraan perumahan dapat terlaksana;
3. Pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang tetap dilaksanakan secara *blended* baik secara daring maupun luring memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang juga ikut berkembang mengikuti kondisi terkini seperti pengawasan jarak jauh dan rapat dari melalui *Video Conference*;
4. Kerjasama dengan berbagai *stakeholder* bidang perumahan yang terus dibina sehingga dukungan dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, mulai dari usulan hingga proses serah terima aset.

Sedangkan faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja organisasi antara lain:

1. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jarak tempuh menuju lokasi pelaksanaan kegiatan cukup jauh dan membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan; dan
2. Keterbatasan jumlah maupun kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga setiap masing-masing pegawai memiliki beban kerja yang melebihi kapasitas dari yang seharusnya.

Dalam upaya meningkatkan capaian beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kegagalan pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Terus menjalin kerjasama yang baik dengan *stakeholder* bidang perumahan dan bidang lainnya seperti Kementerian/Lembaga lain sehingga dapat menciptakan program-program baru yang inovatif dalam penyediaan perumahan;
2. Memaksimalkan fungsi kegiatan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak hanya dapat mencapai *ouput* namun juga *outcome*;
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.

b. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Selama tahun anggaran 2023, terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Dengan tidak direalisasinya kegiatan dan program sangat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V yang tidak maksimal pada tahun ini.

Berikut program dan kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja:

- Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V tahun 2023, diantaranya:

1. Penyusunan laporan perencanaan penyediaan perumahan seperti Rencana Aksi Tahun 2023 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan Tahun 2023;
2. Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PKP serta verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
3. Perencanaan dokumen perencanaan serta survei dan verifikasi teknis pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun;
4. Pembangunan rumah susun bagi Mahasiswa, Santri, ASN/TNI/POLRI dan MBR;
5. Pemeliharaan rumah susun;
6. Pembangunan rumah khusus;
7. Pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya; dan
8. Pembangunan PSU untuk rumah umum MBR;
9. Layanan dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan.

- Program dan Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sedangkan tidak terdapat program dan kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V tahun 2023. Sesuai dengan revisi akhir Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V tercapai melebihi target yaitu diangka 102,51%.

Namun, untuk capaian target Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2020-2024, belum mencapai target maksimal dengan capaian 18,57%. Beberapa program yang belum mencapai target diantaranya:

1. Pembangunan rumah susun bagi Mahasiswa, Santri, ASN/TNI/POLRI dan MBR;
2. Pemeliharaan rumah susun;
3. Pembangunan rumah khusus; dan
4. Pembangunan PSU untuk rumah umum MBR.

4.2 Perbandingan Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Sumatera V. Tujuan ini dilaksanakan dengan memenuhi sasaran kinerja yaitu menyelenggarakan penyediaan perumahan yang layak huni, aman, dan terjangkau melalui diantaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Susun, Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Khusus, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, dan memberikan Bantuan PSU bagi perumahan umum milik MBR.

Tabel 4.6 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2015-2023

KEGIATAN	SATUAN	TAHUN									TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V											
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Dokumen	-	-	-	-	-	3	3	3	3	12
Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN											
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Dokumen	-	-	3	3	2	3	1	1	1	14
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	-	-	-	-	-	340	250	878	1.468
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	-	2.989	2.659	5.847	4.179	7.200	4.092	6.992	4.861	38.819
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	-	100	-	25	3	3	1	-	132
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	-	110	108	195	36	-	197	96	75	817
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	-	-	5	3	7	1	1	2	2	21
SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI LAMPUNG											
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Dokumen	-	-	3	3	3	3	1	1	1	18
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	-	-	-	-	-	150	60	554	764

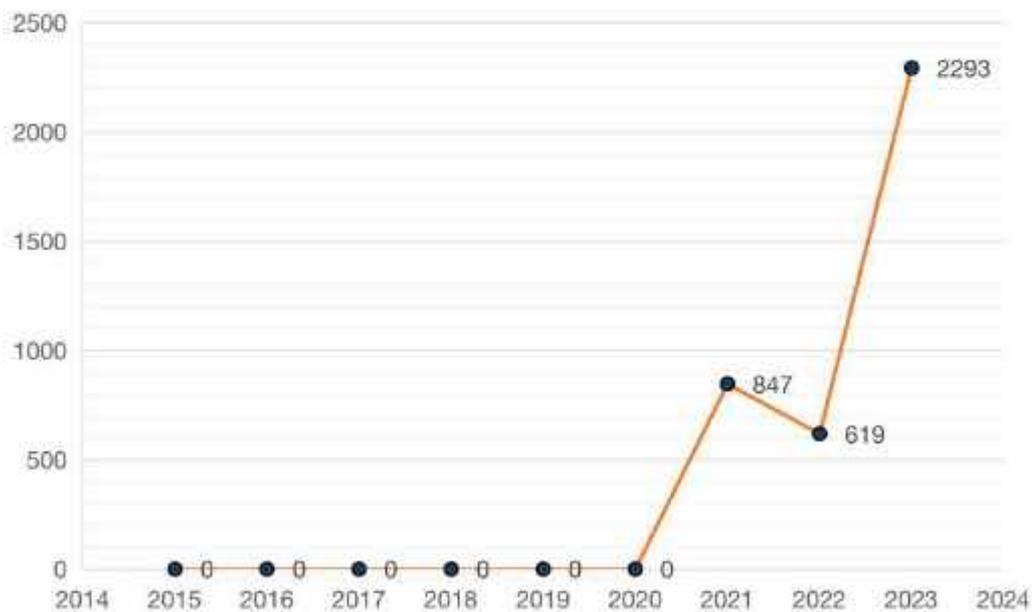
KEGIATAN	SATUAN	TAHUN									TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI LAMPUNG											
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	-	2.000	3.000	5.600	5.588	7.900	2.289	4.440	4.334	35.111
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	112	50	100	75	3	31	-	-	371
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	-	192	298	190	120	43	123	151	-	1.117
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	-	2	2	3	3	2	-	4	-	16
SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG											
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Dokumen	-	3	3	3	2	3	1	1	1	17
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	-	-	-	-	-	357	309	861	1.527
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	-	1.183	2.000	2.000	2.229	2.445	839	900	840	12.436
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	106	-	50	-	-	-	-	-	156
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	-	-	-	84	-	21	-	14	44	163
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	-	1	4	-	3	1	-	-	-	9

Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terbagi atas 3 (tiga) yaitu : Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui tabel di atas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja yang telah dilaksanakan masing-masing satuan kerja dari tahun 2015 hingga tahun 2023.

Selain itu, penjabaran secara detil mengenai penyelenggaraan masing-masing kegiatan di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

4.2.1 Penyelenggaraan Bantuan PSU bagi Perumahan MBR

Program Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bukan merupakan program baru Direktorat Jenderal Perumahan, namun di tahun 2015-2020, kewenangan penyelenggaraan kegiatan ini masih secara penuh dikendalikan dari Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) dan satker strategis di pusat. Namun kewenangan tersebut sudah meluas di tahun 2021 hingga tahun 2023, dimana setiap satuan kerja di wilayah kerja balai berkesempatan untuk menyelenggarakan Bantuan PSU ini secara langsung.



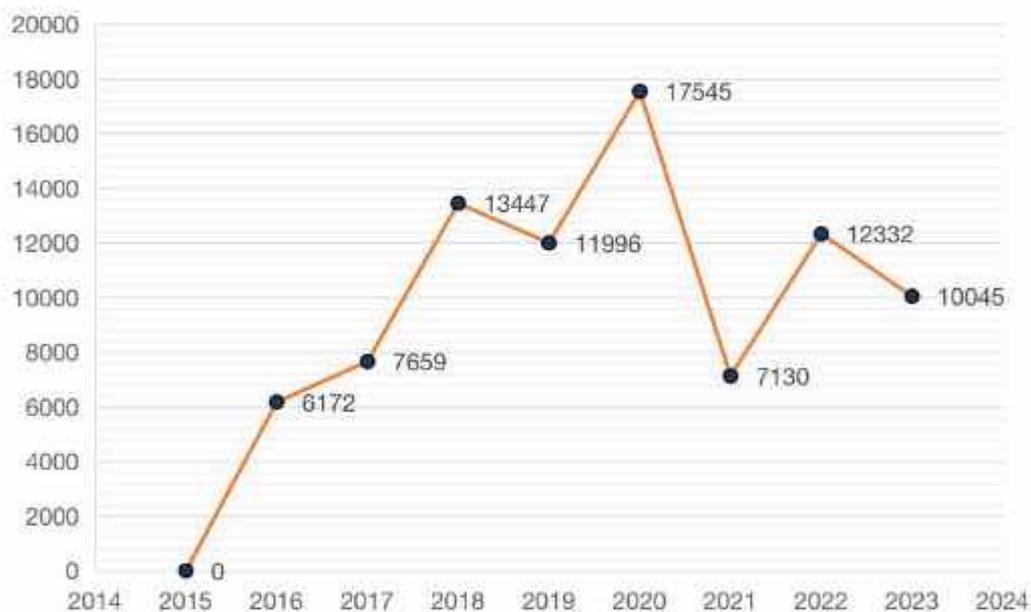
KEGIATAN	SATUAN	TAHUN									
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	-	-	-	-	-	847	619	2.293	

Grafik 4.1 Penyelenggaraan Bantuan PSU bagi Rumah Umum MBR BP2P Sumatera V TA 2015-2023

Di tahun 2023, terdapat 2.293 unit rumah MBR yang mendapatkan manfaat Bantuan PSU berupa jalan lingkungan di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Jumlah ini tentunya belum mampu menyentuh target maksimal Balai, namun menjadi langkah awal yang mampu diperhitungkan pada kegiatan ini.

4.2.2 Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Swadaya

Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Swadaya atau yang dikenal dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Perumahan. Hal ini terutama dikarenakan kegiatan ini berhubungan langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaannya. Selain itu karena tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni yang masih menjadi PR besar dalam bidang perumahan dan permukiman di Indonesia.



KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								
		15	16	17	18	19	20	21	22	23
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	0	6.172	7.659	13.447	11.996	17.545	7.130	12.332	10.045

Grafik 4.2 Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Swadaya BP2P Sumatera V TA 2015-2023

Program BSPS di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V sampai di tahun 2018 memiliki jumlah capaian dengan total 13.447 unit. Di tahun 2019, jumlah ini menurun di angka 11.996 unit dan bertambah kembali di tahun 2020 menjadi 17.545 unit yang menjadi puncak penyelenggaraan rumah swadaya di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

Di tahun 2021 capaian menurun menjadi 7.130 dikarenakan anggaran dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia (World Bank) untuk program *National Affordable Housing Program (NAHP)* tidak dapat secara tuntas diselesaikan di akhir tahun 2021. Dan pada tahun 2022, seiring dengan keadaan yang membaik, capaian program BSPS meningkat kembali diangka 12.332 unit dan pada tahun 2023 menjadi 10.045 Unit.

4.2.3 Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Khusus

Penyelenggaraan rumah khusus mengalami perubahan secara signifikan. Di tahun 2016, terdapat 218 unit rumah khusus yang telah terbangun namun di tahun selanjutnya menurun secara drastis menjadi 150 unit. Jumlah ini semakin menurun hingga di tahun 2020 hanya 6 unit rumah khusus yang dapat di bangun dan pada akhirnya di tahun 2021 dapat kembali meningkat di jumlah capaian sebesar 34 unit dan di tahun 2022 menurun kembali dengan hanya 1 rumah khusus yang terbangun. Ditahun 2023 tidak terdapat pembangunan rumah khusus di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, namun terdapat 16 unit rumah khusus yang dipelihara.



KEGIATAN	SATUAN	TAHUN									
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	218	150	150	100	6	34	1	-	
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	2	-	-	-	-	-	16	

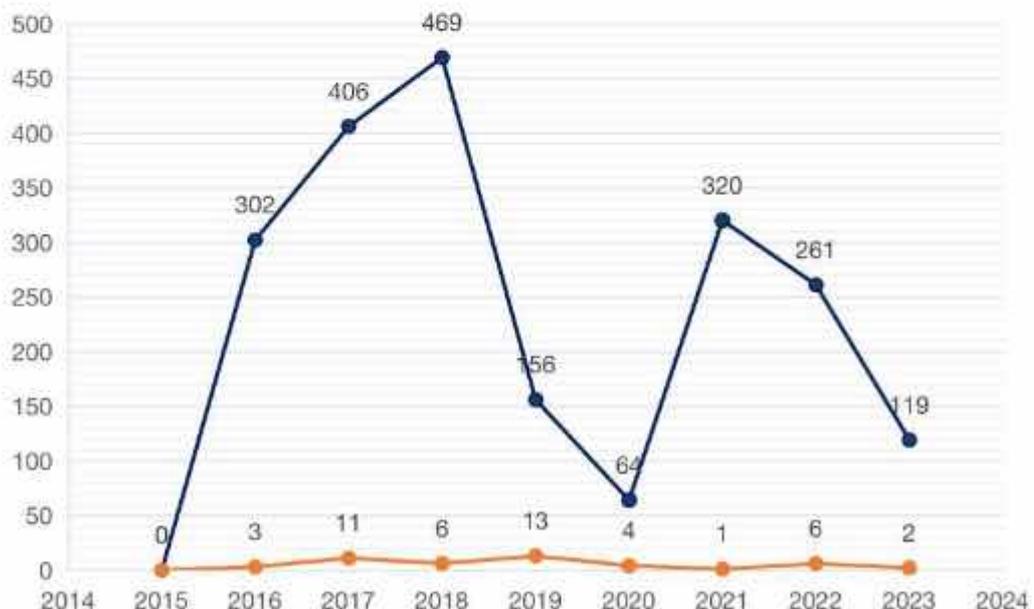
Grafik 4.3 Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Khusus BP2P Sumatera V TA 2015-2023

Faktor terbesar yang memengaruhi kurangnya tren pada penyelenggaraan rumah khusus ini adalah adanya perubahan kriteria prioritas penerima manfaat dalam usulan rumah khusus.

Berdasarkan urgensi perubahan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus, target prioritas rumah khusus saat ini dititikberatkan pada penerima manfaat yang terdampak bencana (skala nasional), terdampak program pemerintah, masyarakat daerah perbatasan, dan/atau masyarakat di pulau terluar, daerah terpencil, dan tertinggal (3T). Berdasarkan pada kriteria tersebut, wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V hampir tidak bersinggungan dengan target prioritas ini sehingga usulan rumah khusus di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V ini tidak dapat secara mudah dipenuhi.

4.2.4 Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Susun

Penyelenggaraan perumahan melalui Rumah Susun mengalami kenaikan secara signifikan dan berkelanjutan sejak tahun 2015-2019. Sejak tahun 2020, pembangunan di bidang rumah susun mengalami penurunan akibat terkena dampak *refocussing* anggaran secara nasional oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak penyelenggaraan pembangunan yang dianggarkan menjadi tahun jamak. Di tahun 2023, jumlah capaian rumah susun mengalami penurunan capaian diangka 119 unit.



KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								
		15	16	17	18	19	20	21	22	23
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	0	302	406	469	156	64	320	261	119
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Unit	0	3	11	6	13	4	1	6	2

Grafik 4.4 Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Susun BP2P Sumatera V TA 2015-2023

Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan rumah susun, mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019-2023. Hal ini disebabkan oleh proses serah terima aset rumah susun ke penerima manfaat di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mengalami percepatan, namun pada tahun 2023, Balai sudah melaksanakan pendataan pada rumah susun yang akan diusulkan untuk menjadi prioritas OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi).

4.3 Realisasi Anggaran

4.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan DIPA Revisi Ke-10 tanggal 19 Desember 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki anggaran total sebesar Rp. 8.199.407.000,-. Hingga bulan Desember 2023, anggaran yang berhasil diserap oleh balai adalah sebesar Rp. 7.925.787.000,- atau sekitar 96,66% dari target.

Tabel 4.7 Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Hingga Akhir Desember Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOL	SATUAN	PAGU	REALISASI	KEUANGAN		FISIK	
				(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Penyediaan Akses Rumah Layak Huni									
1.	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	4.693.103	4.529.316	100,00	96,51	97,32	100,00
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan									
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen	2.870.754	2.792.155	100,00	97,26	100,00	100,00
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/m2/Paket	635.550	604.316	100,00	95,09	100,00	100,00
TOTAL				8.199.407	7.925.787	100,00	96,66	98,46	100,00

a. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

Kebijakan bidang sarana dan prasarana merupakan salah satu kegiatan dalam program perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Di tahun 2023, dianggarkan sebesar Rp 4.693.103.000,- untuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang kebijakan bidang sarana dan prasarana. Nilai anggaran yang diserap oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V hingga akhir Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.529.316.000,- yang digunakan pada kegiatan diantaranya:

1. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat - Daerah

- Sinkronisasi Program Perumahan Pusat - Daerah

Kegiatan sinkronisasi program perumahan pusat-daerah merupakan ajang menjaring usulan program perumahan T-2 dari daerah ke pusat. Kegiatan dilaksanakan untuk melakukan persiapan materi usulan yang akan disampaikan pada Konsultasi Regional di tingkat nasional.

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKP berhubungan dengan kegiatan Pokja dan Forum PKP. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah Sinkronisasi Basis Data PKP, Finalisasi Basis Data PKP, dan rapat-rapat rutin Pokja dan Forum PKP. Pada kegiatan ini juga Balai dibantu oleh Tenaga Ahli Bidang Perumahan yang terdiri TA Kelembagaan, TA Pendataan Perumahan, dan Asisten Tenaga Ahli.

- Verifikasi dan *Monitoring-Evaluasi* (Monev)

Kegiatan verifikasi berguna untuk memeriksa kebenaran data usulan yang telah disampaikan oleh pengusul atau usulan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan penyediaan perumahan yang sudah atau sedang terlaksana.

2. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Swadaya

- Survei dan Wasdal BSPS

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Direktorat Rumah Swadaya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan survei dan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

3. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Susun

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan serta Vertek Rumah Susun

Dalam penyediaan rumah susun terdapat beberapa kegiatan lain selain pembangunan rumah susun diantaranya verifikasi lokasi bantuan rumah susun yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya baik dari segi mutu dan waktu. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemeliharaan dan perawatan rumah susun serta survei dan verifikasi teknik usulan bantuan pembangunan rumah susun.

4. Penyusunan Perencanaan Teknis dan Fasilitasi Penguatan Stakeholder Penyelenggaraan Perumahan

- Penjaringan Usulan dan Verifikasi Lokasi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR TA 2024 serta Koordinasi Pendataan PSR

Dalam kerangka pendanaan ini, penjaringan usulan dilaksanakan guna menginformasikan bantuan kepada pengembang dan *stakeholder* bidang perumahan agar usulan bantuan PSU Perumahan dapat maksimal, sedangkan verifikasi data dilaksanakan guna memvalidasi data usulan Bantuan PSU Perumahan yang telah disampaikan dan lolos seleksi administrasi pada sistem aplikasi SIBARU dan kegiatannya akan dianggarkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

5. Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko di Ditjen Perumahan

- Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Perumahan

Dalam upaya dukungan pelaksanaan manajemen tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan khususnya dalam hal pembinaan kepatuhan intern pelaksanaan penyelenggaraan perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melaksanakan penerapan manajemen risiko. Manajemen Risiko dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi dengan prinsip menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko, menjaga kualitas data terkait risiko dan efektivitas pelaporan.

6. Pendampingan Pengembangan Penerapan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

- Pendampingan Pengembangan Penerapan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

Berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024, Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 merupakan salah satu wujud komitmen manajemen dalam upaya mencegah, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

b. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

Selain memenuhi sasaran dalam penyediaan akses rumah layak huni, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya guna mendukung kinerja. Dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Anggaran yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V untuk layanan dukungan manajemen internal ini di tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.870.754.000,- dan yang terserap hingga Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.792.155.000,-.

Anggaran layanan ini digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan diantaranya Layanan Umum Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Anggaran yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V untuk layanan sarana dan prasarana internal ini di tahun 2023 adalah sebesar Rp 635.550.000,- dan yang terserap hingga Desember 2023 adalah sebesar Rp 604.316.000,-.

Anggaran layanan ini digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan diantaranya pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa pengadaan alat pengolahan data dan pengadaan peralatan dan fasilitas kantor.

4.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023. Rasio penugasan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Penugasan} = (5/\text{Total Pegawai}) \times \text{Jumlah Kegiatan}$$

Tabel 4.8 Rasio Penugasan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

No	Unit Kerja/Satker	Pagu (Rp. Ribu)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pegawai	Rasio Penugasan /Orang	Pagu (Rp. Ribu)/Orang
1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	8.199.407	8	33	1,21	204.985,18
2.	Satker PP Provinsi Sumatera Selatan	149.291.019	8	36	1,11	3.641.244,37
3.	Satker PP Provinsi Lampung	103.249.076	5	31	0,81	2.868.029,89
4.	Satker PP Provinsi Kep. Bangka Belitung	43.443.546	6	27	1,11	1.401.404,71
JUMLAH		304.183.848	27	133		

Berdasarkan tabel rasio penugasan diatas, diasumsikan 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh 5 orang maka rasio penugasan untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah 1 penugasan. Namun, di masing-masing Satuan Kerja rasio penugasan masih diatas 1 penugasan. Maka dari itu diperlukan pendistribusian ulang jumlah pegawai ataupun penambahan pegawai pada bidang tersebut untuk menjaga keseimbangan beban kerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan masing-masing Satuan Kerja.

Selain itu, terdapat permasalahan lain yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V diantaranya:

1. Kurangnya pegawai bidang teknis dan administrasi sehingga beberapa pegawai harus memiliki beban kerja ganda; dan
2. Ketidakeimbangan jumlah pegawai dengan jumlah kegiatan yang membuat beban kinerja yang harus ditanggung oleh pegawai melebihi standar.

b. Sumber Daya Manusia

Sarana dan prasarana yang terdapat di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V diantaranya:

1. Bangunan kantor pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Inspektur Yazid No. 4290 KM 2,5 Kota Palembang. Terletak di lantai 1 pada bangunan 2 lantai dengan luas keseluruhan 328m².

Tabel 4.9 Analisis Kebutuhan Ruang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

PERUNTUKAN RUANG	LUAS RUANG	JUMLAH ORANG	TOTAL KEBUTUHAN RUANG (m ²)
Ruang Kepala Balai	117	1	117
Ruang Kasubbag Umum dan Tata Usaha	11	1	11
Ruang Kasi Wilayah I	11	1	11
Ruang Kasi Wilayah II	11	1	11
Ruang PPK Satker Balai	11	1	11
Ruang Staf	5	29	145
Ruang Rapat	73	-	73
Ruang Penyimpanan (Gudang)	24	-	24
Ruang Pelayanan Publik	20	-	20
Lobby dan Fasilitas Lain	50	-	50
Sirkulasi	25%		118,25
TOTAL			591,25

Setelah dilakukan analisis kebutuhan ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V membutuhkan luas ruangan dengan ukuran 591,25m² untuk dapat menampung 40 orang pegawai.

2. Ketersediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2023, sudah memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan juga mendukung kinerja Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja pada Unit yang Selevel

Realisasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V pada tahun 2023 mencapai 102,51%. Jika dibandingkan dengan unit kerja selevel seperti Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV tahun capaian kinerja tidak jauh berbeda yaitu 103,79%. Perbedaan capaian terdapat pada indikator Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV mencapai 100% sedangkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mencapai 99,97%. Selain itu, terdapat juga perbedaan pada capaian indikator Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mencapai 117,59% sedangkan untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV mencapai 126,56%.

Tabel 4.10 Perbandingan Capaian Kinerja Balai P2P Sumatera V dengan Unit yang Selevel

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Balai P2P Sumatera V			Balai P2P Sumatera IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan	6 Laporan	100,00	5 Laporan	5 Laporan	100,00
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.048 Unit	10.045 Unit	99,97	4.284 Unit	4.284 Unit	100,00
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	119 Unit	119 Unit	100,00	120 Unit	120 Unit	100,00
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower	2 Tower	100,00	4 Tower	4 Tower	100,00
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-	-	-	-
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	100,00	25 Unit	25 Unit	100,00
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	1.950 Unit	2.293 Unit	117,59	915 Unit	1.158 Unit	126,56
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00
				102,51			103,79
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan	100,00	4 Layanan	4 Layanan	100,00
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan	100,00	4 Layanan	4 Layanan	100,00
				100,00			100,00

4.5 Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada LHE Implementasi AKIP Tahun 2023

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), implementasi akuntabilitas kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2022 telah dievaluasi. Implementasi atas AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2022 dikategorikan BB (Sangat Baik) dengan pencapaian 70,36 dan rincian per komponen sebagai berikut:

Tabel 4.11 Rincian Nilai Hasil Evaluasi Implementasi AKIP 2022

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	20,70
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	19,80
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,85
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	70,36

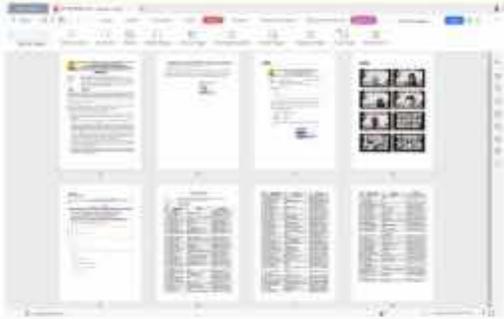
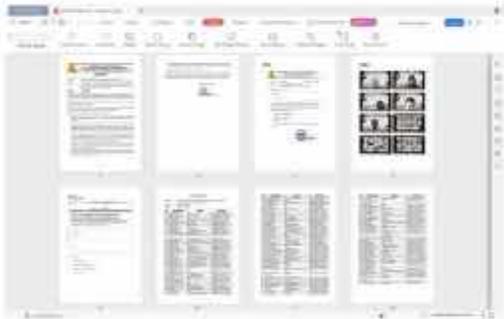
Sumber: LHE Implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2022

Dari hasil evaluasi implementasi atas AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan perbaikan. Dalam implementasi AKIP pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V selama tahun 2023, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 4.12 Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada LHE Implementasi AKIP Tahun 2022

NO.	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	DOKUMENTASI
1.	Perencanaan Kinerja	<p>Pada Dokumen Perencanaan Kinerja berikutnya dapat memperhatikan deadline dalam publikasi pada e-Sakip sesuai dengan Permen PUPR No 9 Tahun 2018</p> <p>Pada Laporan Bulanan berikutnya dapat mencantumkan Capaian Kinerja PK dan Pemantauan didokumentasi dengan baik</p> <p>Pada Laporan Kinerja berikutnya dapat menuangkan Tindak Lanjut atas rekomendasi pada LHE SAKIP tahun sebelumnya</p>	<p>Penyampaian Dokumen Perencanaan Kinerja pada aplikasi e-Sakip telah memperhatikan deadline</p> <p>Pada Laporan Bulanan telah dicantumkan Capaian Kinerja PK dan telah dilakukan pemantauan</p> <p>Tindak lanjut LHE Implementasi AKIP Tahun 2023 telah dituangkan dalam Laporan Kinerja 2023</p>	

Lanjutan Tabel 4.12 Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada LHE Implementasi AKIP Tahun 2022

NO.	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	DOKUMENTASI
1.	Perencanaan Kinerja	Agar pada setiap rapat terkait proses pencapaian kinerja dapat didokumentasikan dengan baik berupa undangan rapat, daftar hadir, notulen, materi dan dokumentasi	Proses pencapaian kinerja telah didokumentasikan	
2.	Pengukuran Kinerja	<p>Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala dapat digambarkan dengan menuangkan capaian PK pada Laporan Bulanan</p> <p>Agar pada setiap rapat terkait proses pencapaian kinerja dapat didokumentasikan dengan baik berupa undangan rapat, daftar hadir, notulen, materi dan dokumentasi</p>	<p>Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan disampaikan melalui Laporan Bulanan</p> <p>Proses pencapaian kinerja telah didokumentasikan</p>	 

Lanjutan Tabel 4.12 Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada LHE Implementasi AKIP Tahun 2022

NO.	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	DOKUMENTASI
3.	Pelaporan Kinerja	<p>Agar Dokumen Laporan Kinerja dapat menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada unit yang selevel</p> <p>Pada Dokumen Laporan Kinerja berikutnya dapat memuat tindak lanjut atas rekomendasi pada LHE</p>	<p>Perbandingan kinerja dengan unit selevel telah dituangkan dalam Laporan Kinerja 2023</p> <p>Tindak lanjut LHE Implementasi AKIP Tahun 2023 telah dituangkan dalam Laporan Kinerja 2023</p>	 
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<p>Agar dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan menuangkan hasilnya dalam Laporan Kinerja</p> <p>Agar dalam mengimplementasikan SAKIP dapat mengacu pada Permen PUPR No 9 Tahun 2018 dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP</p>	<p>Seluruh rekomendasi pada LHE Implementasi AKIP Tahun 2023 telah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Laporan Kinerja 2023</p> <p>Seluruh rekomendasi pada LHE Implementasi AKIP Tahun 2023 telah ditindaklanjuti</p>	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Hingga laporan ini dibuat, tercatat terdapat 148 orang SDM yang bekerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dengan komposisi ASN sebanyak 34 orang, Pegawai Non-ASN 28 orang, 72 orang merupakan Konsultan Individual (KI) dan 15 orang pegawai *outsourcing*.

Di tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.721.257.000,- sesuai dengan DIPA Nomor: SK-DIPA 033.07.1.420148/2023 hingga akhirnya mengalami peningkatan menjadi Rp. 8.199.407.000,- sesuai Revisi ke-10 tanggal 19 Desember 2023. Hingga akhir Desember 2023, total anggaran yang telah diserap oleh balai adalah sebesar Rp. 7.925.787.000,- atau sekitar 96,66%.

Alokasi anggaran ini digunakan guna memenuhi 2 (dua) Sasaran Kinerja yaitu Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Di tahun 2023, guna memenuhi Sasaran Kinerja ke-1, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melaksanakan penyediaan rumah layak huni melalui kegiatan:

1. Penyusunan laporan perencanaan penyediaan perumahan sebanyak 6 laporan;
2. Pembangunan rumah susun sebanyak 119 unit;
3. Pemeliharaan 2 tower rumah susun;
4. Pemeliharaan rumah khusus sebanyak 16 unit;
5. Peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 10.045 unit; dan
6. Memberikan bantuan PSU berupa jalan lingkungan bagi 2.293 unit rumah dan
7. Penyusunan laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko sebanyak 2 laporan.

Selain itu, guna memenuhi Sasaran Kinerja ke-2, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah melaksanakan layanan sarana dan prasarana internal, layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran.

5.2 Rekomendasi

Di tahun yang akan datang, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan mengharapkan agar penyelenggaraan perumahan di lingkungan Balai akan lebih berjalan dengan lebih baik lagi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- Meningkatkan koordinasi dari dalam dan ke luar lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparat Penegak Hukum (APH), dan pemangku kepentingan lainnya;
- Menambah sumber daya manusia (SDM) serta mengoptimalkan pengelolaan dan proses menggali potensi SDM di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V; dan
- Membuat terobosan-terobosan baru di bidang penyelenggaraan perumahan baik yang fisik maupun dukungan manajemen yang dapat lebih membuat penyelenggaraan kegiatan lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Johnny Rakhman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

Iwan Suprijanto

NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama

Johnny Rakhman

NIP. 19670208 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	8.505 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	131 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	3 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit
	7 Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	800 Unit
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan

Kegiatan:

1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman

- a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
- b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan
- c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung
- d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung

2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

- a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
- b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan
- c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung
- d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Anggaran

Rp	252.110.846.000
Rp	4.035.286.000
Rp	167.498.388.000
Rp	64.322.880.000
Rp	16.254.292.000
Rp	5.050.000.000
Rp	2.685.971.000
Rp	1.072.700.000
Rp	722.481.000
Rp	568.848.000
Rp	6.721.257.000
Rp	168.571.088.000
Rp	65.045.361.000
Rp	16.823.140.000
Total Rp	257.160.846.000

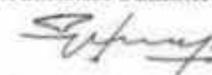
Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal Perumahan



Iwan Suprijanto
NIP. 19710950 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V



Johnny Rakhman
NIP. 19670208 199803 1 002



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Johnny Rakhman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama

Johnny Rakhman
NIP. 19670208 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.048 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	119 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	16 Unit
	7 Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	1.950 Unit
	8 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan

Kegiatan:

1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman

- a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung
d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung

2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

- a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung
d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung

- Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung

	Anggaran
Rp	297.059.672.000
Rp	4.693.103.000
Rp	148.063.739.000
Rp	101.919.026.000
Rp	42.383.804.000
Rp	7.124.176.000
Rp	3.506.304.000
Rp	1.227.280.000
Rp	1.330.850.000
Rp	1.059.742.000
Rp	8.199.407.000
Rp	149.291.019.000
Rp	103.249.876.000
Rp	43.443.546.000
Total Rp	304.183.848.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Direktur Jenderal Perumahan



Iwan Suprijanto
NIP. 19710910 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V



Johnny Rakhman
NIP. 19670208 199803 1 002

LAMPIRAN 2

Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Tahun 2023



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN**

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V

Jalan Jenderal Sudirman / Inspektur Yazid Nomor 7490 KM 2,5 Kota Palembang email, bp2psumaterav@gmail.com

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
CAPAIAN *OUTPUT* TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V**

Hal : Finalisasi Capaian *Output* Tahun 2023 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
Hari/Tanggal : 14 Desember 2023
Pihak Pertama : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
Pihak Kedua : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan laporan capaian pelaksanaan kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2023, maka Capaian *Output* Tahun 2023 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023:

NO	SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni			
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan	6 Laporan	100,00%
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.048 Unit	10.045 Unit	99,97%
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	119 Unit	119 Unit	100,00%
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower	2 Tower	100,00%
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	100,00%
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	1.950 Unit	2.293 Unit	117,59%
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan			
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan	100,00%
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan	100,00%

2. Capaian Kinerja dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023:

NO	SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V				
1.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni			
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%
2.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan	2 Laporan	100,00%

NO	SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V					
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan				
	1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
	2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
	3.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
PROVINSI SUMATERA SELATAN					
1.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni				
	1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	4.864 Unit	4.861 Unit	99,94%
	3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	75 Unit	75 Unit	100,00%
	4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower	2 Tower	100,00%
	5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-
	6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	100,00%
	7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	850 Unit	878 Unit	103,28%
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan				
	1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
	2.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
PROVINSI LAMPUNG					
1.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni				
	1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	4.344 Unit	4.344 Unit	100,00%
	3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	-	-	-
	4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	-	-	-
	5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-
	6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-
	7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	400 Unit	554 Unit	138,50%
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan				
	1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
	2.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG					
1.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni				
	1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	840 Unit	840 Unit	100,00%
	3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	44 Unit	44 Unit	100,00%
	4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	-	-	-
	5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-
	6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-
	7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	700 Unit	861 Unit	123,00%
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan				
	1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
	2.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%

Demikian Capaian *Output* Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023 telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023.

Palembang, 14 Desember 2023

Disetujui oleh:

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V



Johnny Rakhman

Kepala Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan
Provinsi Sumatera Selatan



Yustin Patria Primordia

Kepala Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan
Provinsi Lampung



Heriyanto

Kepala Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan
Provinsi Kep. Bangka Belitung



M. Arifman

LAMPIRAN 3

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2023

SINKRONISASI DAN KOORDINASI PROGRAM PUSAT-DAERAH

- Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat - Daerah TA 2023 untuk Usulan TA 2024
Palembang, 09 - 10 Mei 2023



- Rapat Koordinasi Percepatan Serah Terima Aset BMN
Palembang, 18 - 19 Desember 2023



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Rapat Koordinasi I Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Palembang, 22 - 23 September 2023



- Rapat Kolaborasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE)
Palembang, 19 - 20 Desember 2023



- Advokasi Pembinaan Penyelenggaraan PKP Tahun 2023 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang



Kota Pagaram



Kabupaten Musi Rawas Utara



Kabupaten Musi Banyuasin



Kabupaten Musi Rawas



Kabupaten OKI



Kabupaten PALI



Kota Lubuklinggau



Kabupaten Banyuasin



Kabupaten Muara Enim



Kabupaten Ogan Ilir



Kota Prabumulih



- Kegiatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Selatan



- Pendampingan Penyusunan RP3KP
Kabupaten Banyuwasin



Kabupaten Lahat



Kabupaten OKU



Kota Prabumulih



DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

- Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)



DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

- Verifikasi Teknis Usulan Pembangunan Rumah Susun

Provinsi Sumatera Selatan



Provinsi Lampung



Provinsi Kep. Bangka Belitung



PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS DAN FASILITAS Penguatan STAKEHOLDER PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Penjaringan Usulan Bantuan PSU Perumahan MBR

- Temu Asosiasi Pengembang Perumahan dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesawaran



- Sosialisasi Penggunaan E-Katalog pada Pemilihan Penyedia Jasa untuk Pembangunan PSU Perumahan MBR Tahun 2023



Verifikasi Teknis Usulan Bantuan PSU Perumahan MBR

Provinsi Sumatera Selatan



Provinsi Lampung



Provinsi Kep. Bangka Belitung



- Pendataan Program Sejuta Rumah (PSR)



**PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
DI BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V**

- Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) SNI ISO 37001:2016



- Penyerahan Sertifikat SMAP pada Malam Puncak Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 2023
31 Agustus 2023



- Sosialisasi dan Pemahaman Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 Palembang, 08 - 09 Juni 2023



- Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
Palembang, 03 - 04 Juli 2023



- Audit Eksternal Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
Palembang, 26 - 28 Juli 2023



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RESIKO DI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

- Sertifikasi Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan *Batch II*

Jakarta, 13 - 17 November 2023



- Sertifikasi Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan *Batch III*
Jakarta, 28 November - 01 Desember 2023



**PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TAHAP 1

Perumahan Grand Citra Mandiri II (226 Unit) Kota Palembang



TAHAP 2

Perumahan Pesona Indah Betung (55 Unit) Kabupaten Banyuasin



TAHAP 3

Perumahan Griya Bumi Lestari 3 (64 Unit) Kota Palembang



Perumahan Bukit Baru 2 (68 Unit) Kota Palembang



Perumahan Nusa Indah Selatan 2 (50 Unit) Kota Lubuklinggau



Perumahan Air Temam Madani (52 Unit) Kota Lubuklinggau



Perumahan Kota Baru Sriwijaya (61 Unit) Kota Lubuklinggau



Perumahan Griya Pesona Linggau (52 Unit) Kota Lubuklinggau



Perumahan Permata Permai Residence (50 Unit) Kota Lubuklinggau



Perumahan Cira Residence (50 Unit) Kota Pagaram



Perumahan Atas Prakarsa dan Upaya Kelompok MBR Penyapu Jalan (90 Unit) Kota Prabumulih



Perumahan Atas Prakarsa dan Upaya Kelompok MBR Pemulung (30 Unit) Kota Prabumulih



Perumahan Atas Prakarsa dan Upaya Kelompok MBR Kampung KB untuk Keluarga Terdampak Resiko Stunting (30 Unit) Kabupaten Banyuasin



**PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR
PROVINSI LAMPUNG**

TAHAP 1

Perumahan Sidosari 3 (70 Unit) Kabupaten Lampung Selatan



Perumahan Ayoedia Lestari (140 Unit) Kabupaten Lampung Selatan



TAHAP 2

Perumahan Matrix Residence (78 Unit) Kabupaten Lampung Utara



Perumahan TKBM Pelabuhan Panjang (266 Unit) Kabupaten Lampung Selatan



**PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

TAHAP 1

Perumahan Mulia Indah Residence (94 Unit) Kabupaten Bangka Tengah



Perumahan Damai Lestari 9 (50 Unit) Kabupaten Bangka



TAHAP 2

Perumahan Damai Lestari 5 (85 Unit) Kabupaten Bangka Tengah



Perumahan Damai Lestari 10 (56 Unit) Kota Pangkal Pinang



Perumahan Apple Residence (56 Unit) Kota Pangkal Pinang



Perumahan Taman Jagung Residence (57 Unit) Kota Pangkal Pinang



Perumahan Griya Emerald 77 (56 Unit) Kabupaten Belitung



TAHAP 3

Perumahan Pesona Mangkol Asri 2 (140 Unit) Kabupaten Bangka Tengah



Perumahan Griya Kenanga Asri (65 Unit) Kabupaten Bangka



Perumahan Delano Residence 2 (69 Unit) Kabupaten Bangka



Perumahan Pelangi Residence (133 Unit) Kabupaten Belitung



**BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jumlah Penerima Bantuan 4.861 Unit

0%

Komis - Tanjung Harapan, OKI



30%



100%



Parmin - Penyandingan, OKI



Sarimin - Mesuji Makmur, OKI



Timbul Wahono - Mesuji Makmur, OKI



Yanto - Tanjung Harapan, OKI



BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PROVINSI LAMPUNG

Jumlah Penerima Bantuan 4.334 Unit

0%

Boimin - Panca Jaya, Mesuji



30%



100%



Megi Widiyanto - Gedong Tataan, Pesawaran



Legiman - Jati Agung, Lampung Selatan



Suyanto - Waway Karya, Lampung Timur



Nurhamid - Bahuga, Way Kanan



**BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

Jumlah Penerima Bantuan 840 Unit

0%

Didit - Mapur, Bangka



30%



100%



Joni - Mapur, Bangka



Jumadi - Tanjung Pura, Bangka Tengah



La Ode Idris - Mapur, Bangka



Sandi - Mapur, Bangka



**PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Pembangunan Rumah Susun SYC

Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo

Progres 74,56% (Pemberian Kesempatan berdasarkan pada PMK Nomor 109 Tahun 2023)



Pembangunan Rumah Susun Universitas Islam Ogan Komering Ilir
Progres 70,80% (Pemberian Kesempatan berdasarkan pada PMK Nomor 109 Tahun 2023)



Pembangunan Rumah Susun MYC 2022-2023

Pembangunan Rumah Susun Pemerintah Kota Lubuklinggau



Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Nurul Ilmi



Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun

Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun ASN/Pekerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin



Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya



PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
PROVINSI LAMPUNG

Pembangunan Rumah Susun MYC 2023-2024

Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Hidayatusholihin Kabupaten Lampung Selatan



**PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

Rumah Susun RSUD Ir. Soekarno
Kabupaten Bangka



**PEMELIHARAAN RUMAH KHUSUS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Rumah Khusus LANUD Sri Mulyono Herlambang
Kota Palembang



PILOT PROJECT

PEMBANGUNAN RUMAH INTI TUMBUH TAHAN GEMPA (RITTA)

Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA)
Kota Prabumulih (100 Unit)



STOCKING

PANEL RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA)

Persediaan (*Stocking*) Panel RISHA Provinsi Lampung



